



L A P O R A N
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKIP) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 dapat kami susun dengan baik. LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang protokol dan komunikasi selama tahun berjalan. Dalam LKIP yang disampaikan adalah pertanggung jawaban kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 untuk mewujudkan sasaran kinerja bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 s/d 2029. Kami menyadari betul betapa pentingnya peran protokol dan komunikasi dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan berbagai kegiatan Pimpinan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam penyusunan LKIP ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas kami. Kami juga mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas kami, sehingga kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga LKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tambolaka, 30 Januari 2026

**Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kabupaten Sumba Barat Daya,**

Ariyanto M. Dangga Loma S.STP

Pembina Tk. I – IV/b

NIP. 198306132001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I_PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tujuan dan Manfaat LKIP	3
C. Profil Perangkat Daerah	4
D. Permasalahan Umum Yang Dihadapi Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.....	8
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II_PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Rencana Anggaran.....	18
BAB III_AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
BAB IV_PENUTUP.....	xxiv
A. Simpulan Akuntabilitas Kinerja	xxiv
B. Rencana Tindak Strategis Peningkatan Kinerja.....	xxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana	6
Tabel 2. 1 Penetapan Sasaran.....	15
Tabel 2. 2 Rancangan Anggaran.....	18
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja	20
Tabel 3. 2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	22

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2025 LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan yang dijumpai dlam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2025.

Bagian Protokol dan Komunikasi merupakan salah satu dari sembilan unit bagian yang berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan memiliki visi, misi dan tujuan strategis. Untuk mewujudkannya maka ditetapkanlah satu sasaran kinerja yaitu Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional

Tambolaka, 30 Januari 2026

Kepala Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Ariyanto M.D.Loma, S.STP
Pembina Tk-I/IV-b
Nip.19830613 200112 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Daerah Sumba Barat Daya sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumba Barat Daya (SBD) menjadi elemen krusial untuk memastikan koordinasi yang efektif, komunikasi yang transparan, serta menjaga citra dan integritas institusi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Sumba Barat Daya senantiasa berupaya menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi fondasi dalam menjalankan proses komunikasi internal di antara anggota organisasi, serta menjadi landasan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak eksternal seperti instansi pemerintah lainnya, masyarakat, dan mitra kerja.

Keberhasilan Sekretariat Daerah Sumba Barat Daya dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja tidak hanya bergantung pada pencapaian angka-angka kuantitatif, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam menjaga hubungan yang baik, menjalin komunikasi yang efektif, dan menjalankan protokol yang sesuai dengan etika dan tata nilai yang berlaku.

Dasar acuan dalam penyusunan LKIP adalah Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Permen PAN-RB Bab I Ayat 11, disebutkan Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sedangkan Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik. Pencapaian sasaran pada pasal 16 ayat 2 sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja lima (5) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini menggambarkan kinerja yang dicapai, berhasil atau gagal, atas pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai Rencana Strategis Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP juga dapat merupakan sarana untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kinerja yang dicapai lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi bagian integral dari upaya Sekretariat Daerah Sumba Barat Daya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap langkah-langkah kebijakan dan kegiatan operasional.

B. Tujuan dan Manfaat LKIP

Tujuan dan Manfaat penyusunan LKIP, sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permen PAN-RB 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan pembuatan LKIP yaitu:

- a. Memberi pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pda tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dala mencapai kehematan,efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- d. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan baik jangka pendek maupun menengah.

2. Manfaat

Manfaat pembuatan LKIP yaitu:

- a. Mendorong instansi pemerintah, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (good governance).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Profil Perangkat Daerah

1. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Sesuai Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka tugas dan fungsi serta struktur organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi

Tugas: melakukan pembinaan dan melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengorganisasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.

Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
- 2) Penyiapan bahan pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Struktur Organisasi

- 1) Kepala Bagian Protokol
- 2) Kasubag Protokol
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Kelompok Jabatan Pelaksana

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak. Jabatan yang ada jabatan struktural dan jabatan fungsional dan Pelaksana. Sampai dengan bulan Januari tahun 2026, pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan rincian sebagai berikut:

a. PNS Menurut Latar belakang Pendidikan:

Sarjana (S1)	= 10 orang
D3	= 3 orang
SLTA	= 7 orang

b. Menurut Golongan:

Golongan I	= - orang
Golongan II	= - orang
Golongan III	= 4 orang
Golongan IV	= 1 orang

- Golongan IX (P3K) = 5 Orang
 Golongan VII = 3 Orang
 Golongan V = 7 Orang
- c. Menurut Diklat Penjenjangan dan Perencanaan yang diikuti:
 Diklatpim III = 1 orang
 Diklatpim IV = 1 orang
- d. Menurut jabatan Struktural:
 Eselon III = 1 orang
 Eselon IV = 1 orang
- e. Tenaga Kontrak:
 Sarjana = - orang
 DIII = - orang
 SMA = 3 orang

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor di lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur belum memadai, terlihat seperti tabel berikut:

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	3	1 baik, 1 Rusak Ringan
2	Sepeda Motor	1	1 Rusak ringan, 1 rusak berat
3	Stabilizer	1	Baik
4	Filling Besi/Metal	1	Rusak ringan
5	Lemari Kaca	1	Baik
6	Papan Pengumuman	2	1 baik, 1 rusak ringan
7	Rak kayu	7	3 rusak berat, 4 baik
8	Kursi rapat	1	Rusak berat
9	Kursi putar	2	1 rusak berat, 1 baik
10	Meja computer	2	Rusak berat
11	Meja biro	1	Baik
12	Kursi plastic	10	7 rusak berat, 3 baik

13	Kursi kerja	10	Baik
14	Gorden	10	Baik
15	Microphone	1	Tidak ditemukan
16	Kamera video	2	Baik
17	Kamera foto	3	2 rusak,1 rusak berat
18	Dispenser	1	rusak berat
19	Lampu sorot	1	Rusak berat
20	Computer pc	1	1 Baik
21	Laptop	6	4 baik,2 rusak berat
22	Notebook	1	Rusak berat
23	Cardreader	10	Rusak berat
24	Harddisk	5	4 baik, 1rusak berat
25	Printer	2	baik
26	Proyektor	1	Rusak berat
27	Drone	1	Baik
28	Handy talki	6	Baik
29	KURSI PIMPINAN STANDAR 1/2 BIRO	3	Baik
30	KURSI TAMU SOFA/2 MEJA KAYU	1	Baik
31	Kursi Fernekel	10	Baik
32	Sound sytem	1	Baik
33	Mixer Live	1	Baik
34	Keyboard	1	Baik
35	Komputer/PC All in one	1	Baik
36	iphone	1	Baik

D. Permasalahan Umum Yang Dihadapi Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Sumba Barat Daya yang dimana sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah karena kurangnya sumber daya baik personil maupun anggaran yang menghalangi terciptanya pelayanan yang belum optimal terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. jumlah personil sangat banyak dalam ruangan yang terbatas, namun SDM yang berkompeten terbatas, hal ini terkadang menimbulkan harus diajarkan berulang-ulang kali untuk pemahaman sikon protocol di lapangan. Personel yang membantu dibidang adminstrasi sedikit sekali, dan kurang inisiatif untuk berkembang. Keterbatasan anggaran mungkin membatasi kemampuan untuk merekrut karyawan yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai untuk tugas dan tanggung jawab mereka, Kurangnya anggaran operasional dapat membatasi kemampuan lembaga untuk menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan operasionalnya dengan efektif.
- b. Belum optimalnya Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun, Tantangan utama meliputi ketidakjelasan strategis dalam perencanaan bersama, perbedaan kebijakan dan regulasi, ketidaksetaraan dalam kontribusi sumber daya, ketidakpastian anggaran, kurangnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, kurangnya mekanisme evaluasi yang efektif, dan pengaruh politik lokal serta kepentingan pribadi. Ketidakpastian atau keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan lembaga untuk merencanakan dan melaksanakan program kerjasama dengan efektif, mempengaruhi kualitas pelayanan yang dapat disediakan. Absennya mekanisme evaluasi yang efektif dapat menyulitkan

pemantauan dan penilaian dampak kerjasama. Adanya politik lokal dan kepentingan pribadi dapat menyebabkan divergensi tujuan atau penentangan dalam pengambilan keputusan, mengakibatkan ketidaksepakatan dan kesulitan mengimplementasikan kebijakan bersama.

- c. Belum optimalnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan. Sarana prasarana yang tersedia saat ini tidak mendukung pelaksanaan kegiatan protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan dilapangan karena kondisi alat kerja yang sudah sudah tidak layak untuk digunakan.

E. Sistematika Penyajian

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP. Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Bagian Organisasi, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2026 serta Rencana Anggaran Tahun 2026.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan simpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Disamping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran-lampiran: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Rencana Strategis (RS), Indikator Kinerja Utama (IKU), Revisi RPJMD 2025 – 2029.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 - 2029 yakni :

“Terwujudnya Sumba Barat Daya Hebat Yang berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan pangan dan berbudaya menyongsong Indonesia Emas 2045”.

Penjabaran Visi:

- a. Hebat : Masyarakat Sumba Barat memiliki produktifitas dan Kreatifitas dalam mengolah potensi local menjadi produk-produk yang berkualitas dan mampu bersaing secara regional, nasional dan internasional;
- b. Berkarakter : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kepribadian yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat sehingga menjadi ciri khas yang tidak akan hilang oleh perkembangan zaman;
- c. Sehat : Masyarakat Sumba Barat Daya sehat secara jasmani dan Rohani, sehingga mampu ber-interaksi secara aktif dan memiliki kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan ;
- d. Cerdas : Masyarakat Sumba Barat Daya memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang unggul sehingga sangat

adaptif dan mampu bersaing secara regional, nasional, dan internasional;

- e. Berketahanan Pangan : Masyarakat Sumba Barat Daya mampu mempertahankan ketersediaan pangan secara mandiri dan konsisten dengan memanfaatkan potensi local yang ada, ditengah ancaman perubahan iklim;
- f. Berbudaya : Masyarakat Sumba Barat Daya selalu menjaga dan memelihara tradisi budaya dan adat-istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menjaga keselarasan dan harmonisasi kehidupan, sehingga menciptakan situasi damai dan Sejahtera.

2. Pernyataan Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025 - 2029, yakni :

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur;
6. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup; Dan
7. Meningkatkan Pelayanan Publik

a. Penetapan tujuan

Tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dalam RPJMD 2025- 2029 adalah mengembangkan potensi ekonomi local

untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan Masyarakat;

“Misi Mewujudkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; memberikan pelayanan Pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, serta berupaya meningkatkan mutu Pendidikan melalui program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik;

“Misi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; memberikan akses dan mutu pelayanan Kesehatan yang baik melalui Pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, serta mengupayakan penyediaan tenaga medis yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan melakukan edukasi Masyarakat tentang pentingnya kesehatan;

“Misi Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur; melakukan Pembangunan infrastruktur yang ter-integrasi dan berkelanjutan, seperti jalan, jembatan dan sarana transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas Masyarakat serta perekonomian local;

“Misi Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup; melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kesadaran Masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan pengurangan dampak negative Pembangunan terhadap lingkungan;

“ Misi Meningkatkan Pelayanan Publik: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan public, serta mempercepat proses birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat.

b. **Penetapan Sasaran**

Penetapan sasaran merupakan proses menetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam suatu aktivitas, proyek, atau perencanaan tertentu adapun sasaran yang dimiliki Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yakni:

Tabel 2. 1 Penetapan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	2	3	4
1.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan professional.	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional	Cakupan pelaksanaan operasional KDH/WKDH dan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya sarana dan prasarana
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. RKT tersebut telah ditindak lanjuti menjadi Penetapan Kinerja (PK) Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Tujuan, Sasaran dan Program/Kegiatan Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah, dan Penetapan Kinerja (PK) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional.	- Cakupan pelaksanaan operasional KDH/WKDH dan Sekretariat Daerah	100%
		- Meningkatnya sarana dan Prasarana	100%
		- Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%
		- Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100%

No.	Program Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1. 076.913.786
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 25.805.000

No.	Program Kegiatan		Anggaran
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 22.070.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 54.703.750
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 46.396.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 8.307.750
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 71.405.496
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 71.405.496
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 167.331.640
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 167.331.640
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 199.863.400
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 198.213.400
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.650.0000
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 557.804.500
		Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 453.704.000
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 52.630.000
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 51.470.500

C. Rencana Anggaran

Rencana Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.076.913.786 terdiri dari:

Tabel 2. 2 Rancangan Anggaran

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 25.805.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 54.703.750
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 71.405.496
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 167.331.640
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 199.863.400
6	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 557.804.500
Jumlah		Rp. 1. 076. 913.786

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Penetapan Kinerja

Langkah selanjutnya setelah penetapan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 atau melalui penyelarasan RKT dan PK Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (*Pengukuran Kinerja Kegiatan*) dan Formulir PPS (*Pengukuran Pencapaian Sasaran*).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase pencapaian} & & 971.257.216 \text{ (Realisasi)} \\ \text{Rencana tingkat capaian} & = & \frac{\text{-----}}{1.076.913.786 \text{ (Rencana)}} \times 100 \% \end{array}$$

Dari pengukuran kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD / Unit yang telah ditetapkan. Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam “*Skala Pengukuran Ordinal*” sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja

No	Skala Persentase Capaian Kinerja	Predikat
1	85 % - 100 %	Sangat berhasil
2	70 % - 84 %	Berhasil
3	55 % - 69 %	Cukup berhasil
4	< 55 %	Tidak berhasil

B. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh Kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai satu (1) sasaran adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan professional.	100	90%	90%
Rata-Rata		100	90%	90%

C. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 yakni Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif Dan Profesional yang dimana terdapat dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Seluruh Kegiatan tersebut direncanakan untuk mencapai satu (1) sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : **Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel, inovatif dan Profesional**

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 90 %. Dalam usaha mencapai sasaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menetapkan 1 Program, 1 Sasaran Indikator dan 3 Indikator Capaian Kinerja. Pencapaian target kinerja nampak pada tabel berikut seperti ini:

Tabel 3.2.Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Cakupan Pelaksanaan Tugas Komunikasi Pimpinan (%)	100%	96%	96%
	Cakupan Pelaksanaan Keprotokoleran (%)	100%	94%	94%
	Cakupan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (%)	100%	99.55%	99.55%
Rata-Rata		100	289.55	95,52%

Dari satu (1) indikator pencapaian kinerja tersebut menampilkan bahwa Indikator ***Sangat Berhasil*** mencapai karena memiliki angka presentase capaian kinerja 85-100%. Apabila ditinjau dari lima (5) tahunan dalam renstra, sampai dengan tahun ini sasaran 1 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Faktor penyebab indikator sasaran tersebut belum mencapai target kinerja, yaitu:

1. Komitmen pimpinan PD /Unit yang lemah
2. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pada PD/Bagian dalam hal perencanaan yang baik dan benar.
3. Belum adanya sistem Reward dan Punishment.

Untuk mengatasi hambatan di atas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk menyusun standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan renstra
3. Menyampaikan telaahan kepada Pimpinan untuk menetapkan reward and punishment kepada PD/Bagian yang menyusun dan tidak menyusun renstra.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kemampuan Pengelolaan anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui tabel berikut ini:

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional	1. 076.913.786	971.257.216	90%
Program	Program Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. 076.913.786	971.257.216	90%
Kegiatan				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 25.805.000	Rp 25.805.000	100%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 54.703.750	Rp 54.517.750	100%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp71.405.496	Rp64.153.956	90%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 199.863.400	Rp 124.155.260	62%
5	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 252.513.000	Rp246.433.000	96%

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 90 % atau termasuk dalam kategori sangat baik. Pencapaian realisasi anggaran tersebut memang belum sesuai dengan yang direncanakan yakni 100%. Hal ini terjadi karena efisiensi belanja yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Akuntabilitas Kinerja

Simpulan akuntabilitas kinerja berdasarkan rancangan anggaran dan realisasi kegiatan serta belanja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan anggaran mencapai 90 % dari anggaran yang direncanakan pada tahun 2025, menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran.
2. Meskipun terdapat sisa anggaran sebesar Rp.105.656.570, namun hal ini dapat dimaklumi sebagai bagian dari penyesuaian rencana kegiatan yang mungkin diperlukan selama tahun anggaran berjalan.
3. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami alasan terjadinya selisih antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang direalisasikan, serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di masa yang akan datang.

B. Rencana Tindak Strategis Peningkatan Kinerja

Berdasarkan rancangan anggaran dan realisasi kegiatan serta belanja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025, serta pencapaian realisasi sebesar 90% dari anggaran yang telah direncanakan, berikut

adalah beberapa rencana tindak strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang:

1. Evaluasi Penggunaan Anggaran: Melakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan atau diperbaiki.
2. Penyusunan Rencana Anggaran yang Lebih Realistis: Memastikan rencana anggaran yang disusun lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan organisasi untuk melaksanakannya.
3. Peningkatan Pengawasan dan Monitoring: Memperkuat sistem pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan anggaran agar dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pemborosan.
4. Peningkatan Kualitas Pelaporan: Menyempurnakan sistem pelaporan keuangan dan kinerja untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan kepada pemangku kepentingan.
5. Pengembangan SDM: Melakukan pengembangan dan pelatihan terhadap SDM yang terlibat dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka.
6. Penyusunan Rencana Cadangan: Menyiapkan rencana cadangan untuk mengatasi potensi risiko atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
7. Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kerja sama dan kemitraan dengan pihak eksternal untuk memperluas sumber daya dan mendukung pelaksanaan kegiatan dengan lebih efektif.
8. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Demikian LKIP ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan kemasyarakatan ke depan.

Tambolaka, 29 Januari 2026

**Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kabupaten Sumba Barat Daya,**

Ariyanto M. Dangga Loma S.STP

Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 198306132001121004

